

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) dalam Zeptian dan Rohman (2013) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku memiliki informasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Menurut Herawaty (2008), Teori agensi menjelaskan bahwa organisasi merupakan jaringan hubungan kontraktual antara manajer atau agen dengan pemilik, kreditor, dan pihak-pihak lain atau yang disebut prinsipal. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen.

Pearce dan Robinson (2008) menjelaskan, Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agen*) di suatu perusahaan maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini, dan

kesadaran bahwa agen itu mahal, menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Ketika pemilik (atau manajer) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat hubungan keagenan kedua belah pihak. Hubungan keagenan, seperti hubungan antara pemegang saham dengan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, maka keputusan yang diambil oleh manajer kemungkinan besar akan mencerminkan preferensi manajer dibandingkan dengan pemilik.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumption*), asumsi informasi (*information assumptions*).

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *Self-interest*, sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri
2. *Bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan
3. *Risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Herawaty (2008) berpendapat bahwa *agency conflict* timbul pada berbagai hal sebagai berikut:

1. Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. misalnya investasi yang bisa meningkatkan nilai individu manajer

walaupun biaya penugasannya tinggi sehingga para manajer akan berada pada posisi untuk mengekstrak tingkat remunerasi yang lebih tinggi dari perusahaan (*moral-hazard*).

2. Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif (*internal positive investment opportunities*) atau disebut *earning retention*.
3. Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah resiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan terbaik bagi perusahaan (*risk aversion*).
4. Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cash flow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi (*short-term accounting return project*) dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV positif yang jauh lebih besar (*time-horizon*).
5. Asumsi dasar lainnya yang membangun *agency theory* adalah *agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan *return* maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik (*agency problem*).

Secara sederhana, Shleifer dan Vishny (1997) dalam Sanjaya (2010) menjelaskan bahwa manajer mengendalikan perusahaan dan konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Konflik ini disebut sebagai *Agency Problem I* (Villalonga dan Amit, 2006).

Berikutnya, pemegang saham mengelompokkan diri menjadi pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajer. Akan tetapi, pemegang saham pengendali meminta manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Ini merugikan pemegang saham nonpengendali. Dalam hal demikian,

konflik keagenan terjadi antara pemegang saham pengendali dan nonpengendali. Konflik ini disebut *Agency Problem II* (Villalonga dan Amit, 2006).

2.1.2. Entrenchment (Hak Kontrol)

Menurut Fan dan Wong (2002) dalam Sanjaya (2010), *entrenchment* adalah: “tindakan pemegang saham pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan *abuse of power* seperti ekspropriasi”.

Pemegang saham pengendali dengan hak kontrol yang kuat menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi dibanding kepentingan pemegang saham nonpengendali. Hal ini mengimplikasikan efek *entrenchment* pemegang saham pengendali (Sanjaya, 2010). Investor besar dapat menunjukkan kepentingannya sendiri tanpa perlu sepakat dengan kepentingan investor-investor lain atau dengan manajer dan karyawan (Fatmawati, 2013).

Menurut La Porta (1999) dalam Siregar (2008), Hak kontrol adalah: “hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan.”

Menurut Du dan Dai (2005), hak kontrol adalah: “hak pemegang saham biasa untuk memilih dewan direktur dan kebijakan-kebijakan perusahaan seperti penerbitan sekuritas, pemecahan saham, dan perubahan substansial dalam operasi perusahaan.”

Menurut Siregar (2008) ada dua jenis hak kontrol, yaitu hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil

kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak kontrol adalah penjumlahan hubungan paling lemah (*weakest link*) dalam setiap rantai kepemilikan.

Sedangkan ekspropriasi menurut Siregar (2008) adalah: “proses penggunaan hak kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain”.

La Porta *et al.* (1999) memperkenalkan hak kontrol pemegang saham pengendali yang ditentukan sebesar jumlah kepemilikan minimum dalam rantai kepemilikan. Angka kepemilikan minimum (bukan maksimum) ditentukan sebagai ukuran kemampuan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi sebuah perusahaan yang ada pada ujung rantai kepemilikan (perlu diingat bahwa ini bukan kepemilikan langsung). Seorang pemegang saham pengendali tidak dapat mengendalikan perusahaan yang berada di ujung rantai kepemilikan apabila yang digunakan adalah kepemilikan maksimum karena kepemilikan tersebut bukanlah kepemilikan langsung.

Fatmawati (2013) menyimpulkan bahwa aktivitas oportunistik dari pemilik mayoritas ini akan membahayakan perusahaan. Akan tetapi, karena pemilik tersebut juga mengontrol persiapan laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan, mereka akan berusaha menyembunyikan keadaan sebenarnya dengan menaikkan laba yang dilaporkan.

Menurut Siregar (2008), ada dua mekanisme yang lazim digunakan pemegang saham pengendali untuk mengendalikan suatu perusahaan melalui

perusahaan lain dapat diketahui yaitu kepemilikan piramida (*pyramid ownership*) dan lintas kepemilikan (*cross-holding*). Kepemilikan piramida adalah kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui perusahaan publik maupun perusahaan nonpublik.

Efek *entrenchment* mencakup ekspropriasi laba perusahaan yang ditransfer kepada perusahaan lain yang masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali dapat juga melakukan ekspropriasi tentang pencarian tujuan yang tidak memaksimalkan laba perusahaan.

Menurut Dyanti (2012), pemegang saham pengendali seringkali menggunakan hak kendali mereka untuk melakukan *entrenchment* melalui pemilihan anggota keluarga atau seseorang yang mereka percayai untuk ditunjuk dalam jajaran direksi sehingga kecenderungan keputusan strategi yang diambil lebih menguntungkan pemegang saham pengendali. Kondisi ini semakin diperkuat ketika hak kendali melebihi jauh di atas hak arus kas.

Masalah *entrenchment* menurut Dyanti (2012) juga dapat terjadi apabila keluarga selaku pendiri perusahaan (*founder's family*) memiliki kepemilikan saham yang kecil pada perusahaan induk, namun memiliki hak kendali yang cukup besar sehingga dapat melakukan kendali terhadap anak perusahaan melalui kepemilikan sahamnya. Apabila anggota keluarga dari *founder's family* menduduki posisi sebagai pimpinan puncak, berbeda dengan manajer profesional lainnya yang tidak memiliki kepemilikan saham yang signifikan, manajer dari *founder's family* memiliki hak kendali sehingga tidak mudah dikenakan sanksi disiplin. Kondisi ini bisa mengarah pada ekspropriasi pada pemegang saham

nonpengendali. Dengan demikian diduga kepemilikan saham pengendali oleh keluarga lebih berpotensi meningkatkan risiko ekspropriasi pemegang saham pengendali atas hak pemegang saham nonpengendali.

Adapun formulasi pengukuran *entrenchment* tersebut mengacu pada La Porta *et al.* (2002) dan Claessens *et.al.* (2002) adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{CR = Hak Kontrol Langsung + Hak Kontrol Tidak Langsung}$$

Dimana:

CR = *Control Right*

Hak kontrol langsung = Persentase kepemilikan atas nama diri sendiri

Hak kontrol tidak langsung = Jumlah kepemilikan minimum di setiap rantai kepemilikan

2.1.3. *Alignment* (Hak Aliran Kas)

Pengertian *alignment* menurut Sanjaya (2010) adalah: “tindakan pemegang saham pengendali yang selaras dengan kepentingan pemegang saham nonpengendali”.

Menurut Siregar (2008), pemegang saham pengendali juga dapat menimbulkan efek yang positif, yaitu *alignment*, apabila pemegang saham pengendali mempunyai *cash flow right* yang relatif tinggi. Pemegang saham pengendali memiliki hak aliran kas yang cukup untuk mencegah keinginannya untuk mengekspropriasi pemegang saham nonpengendali dan perusahaan. Lebih besar konsentrasi hak aliran kas, lebih besar insentif pemegang saham pengendali menjalankan perusahaan secara benar. Hal ini mengimplikasikan efek *alignment*.

Pengertian hak aliran kas menurut La Porta *et al.*, (1999) adalah: “klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan.”

La Porta *et al.*, (1999) mengklasifikasikan hak aliran kas menjadi dua yaitu hak aliran kas langsung dan hak aliran kas tidak langsung. Hak aliran kas langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri. Hak aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian persentase saham dalam setiap rantai kepemilikan. Hak aliran kas tidak langsung menunjukkan klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen secara tidak langsung melalui mekanisme kontrol terhadap perusahaan.

Menurut Sanjaya (2010), kepemilikan aliran kas oleh pemegang saham pengendali mengurangi keinginannya untuk mengekspropriasi dan meningkatkan keinginannya untuk membayar dividen tunai. Hak aliran kas yang lebih besar merupakan komitmen pemegang saham pengendali untuk membatasi ekspropriasi.

Siregar (2008) mengemukakan hak arus kas memberikan insentif kepada pemegang saham untuk menjalankan perusahaan dengan benar. Semakin tinggi hak arus kas akan makin mendorong pemegang saham pengendali untuk menjalankan perusahaan yang sejalan dengan tujuan perusahaan dengan pemegang saham nonpengendali.

Pemegang saham besar memiliki kepentingan dalam maksimalisasi laba dan kendali terhadap aset perusahaan yang cukup agar kepentingannya tersebut dihormati. Akibatnya, kepentingan pemilik mayoritas ini dapat selaras dengan lebih baik dengan kepentingan perusahaan ketika konsentrasi kepemilikan tinggi.

Kepemilikan yang terkonsentrasi tinggi juga dapat bertindak sebagai sinyal untuk membangun reputasi bagi pemilik mayoritas karena akan menyebabkan diskon pada harga saham dan akibatnya akan mengurangi kekayaan merek. Hal ini akan mendorong pemilik mayoritas untuk meminimalkan laba akuntansi guna melindungi masa depan perusahaan dan masa depan mereka sendiri (Fatmawati, 2013).

Adapun formulasi pengukuran *Alignment* tersebut mengacu pada La Porta *et al.* (2002) dan Claessens *et.al.* (2002) adalah sebagai berikut:

$$\text{CFR} = \text{Hak aliran kas langsung} + \text{Hak aliran kas tidak langsung}$$

Dimana:

CFR = *Cash Flow Right*

Hak aliran kas langsung = Persentase kepemilikan atas nama diri sendiri

Hak aliran kas tidak langsung = Perkalian % kepemilikan dalam setiap rantai kepemilikan

2.1.4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahidahwati (2012) kepemilikan manajerial merupakan: “pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan.”

Menurut Lamora dan Kamaliah (2014), kepemilikan manajerial merupakan: “kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan.”

Sedangkan menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007), kepemilikan manajerial merupakan: “kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen.”

Menurut Jensen & Mecling (1976) salah satu alat untuk mengurangi *agency cost* adalah meningkatkan kepemilikan manajerial serta *institutional investor*. Dengan adanya pemisahan ini, maka ada pengawasan yang optimal pada manajemen perusahaan. Struktur kepemilikan saham dapat dibedakan menjadi dua yaitu struktur kepemilikan menyebar (*outsider system*) dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (*insider system*). Pada bentuk kepemilikan menyebar (banyak pemilik dengan prosentase kepemilikan yang kecil), konflik keagenan terjadi antara manajer yang memiliki posisi kuat serta pemegang saham yang posisinya lemah karena jumlah kepemilikannya yang relatif kecil. Pada kepemilikan konsentrasi, konflik terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Menurut Gunarsih (2003) salah satu bentuk pengaturan untuk mengurangi *agency cost* melalui kombinasi struktur kepemilikan tertentu yang bertujuan untuk membatasi gerak langkah manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan. Pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan melalui keputusan-keputusan yang diambil. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga-tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Menurut Wahidahwati (2002) dengan adanya kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan langsung dampak dari setiap keputusan yang diambil termasuk dalam menentukan kebijakan hutang perusahaan. Kepemilikan manajerial yang semakin meningkat akan membuat kekayaan pribadi manajemen semakin terikat erat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha untuk mengurangi risiko kehilangan kekayaannya.

Menurut Widarjo (2010) dalam Diniartika (2013) manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya jika kepemilikan manajer turun, maka biaya keagenannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan manajer akan melakukan tindakan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, manajer akan cenderung untuk memanfaatkan sumber-sumber perusahaan untuk kepentingannya sendiri.

Variabel kepemilikan manajerial pada penelitian ini diproksikan dengan persentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Pihak Manajemen}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

KM adalah kepemilikan manajerial. Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen yang dimaksud adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun.

2.1.5. Kepemilikan Institusional

Menurut Wahidahwati (2012) Kepemilikan institusional adalah: “kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti Bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan institusi lainnya.”

Menurut Isnanta (2011) dalam Verawati (2012), kepemilikan institusional adalah: “kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun.”

Sedangkan menurut Siregar dan Utama (2005) kepemilikan institusional merupakan: “kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.”

Menurut Wahidahwati (2012), Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap

kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lain.

Siregar dan Utama (2005) mengemukakan bahwa investor institusional sering juga disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) dan seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan dengan investor non institusional.

Salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi sebagai *monitoring agen*. Dengan kata lain kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan prosentase kepemilikan institusional dapat menurunkan prosentase kepemilikan manajerial, karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional saling menggantikan sebagai fungsi monitoring.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) salah satu alat monitoring yang digunakan untuk mengurangi *agency conflict* adalah meningkatkan kepemilikan institusional. Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka meminimumkan *agency cost* dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan prosentase kepemilikan institusional dapat menurunkan prosentase kepemilikan manajerial.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Dengan semakin

meningkatnya kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat kontrol internal terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi biaya keagenan. Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen meminimalisir penggunaan aset untuk kepentingan pribadinya sehingga mampu meningkatkan kinerja manajemen dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan yang mendaftarkan sahamnya pada pasar modal. Melalui mekanisme pasar modal, perusahaan akan selalu mendapatkan pengawasan melalui publikasi laporan keuangannya.

Variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini diproksikan dengan persentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki institusi lain dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Pihak Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

KI adalah Kepemilikan Institusional. Jumlah saham yang dimiliki pihak institusional yang dimaksud adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun.

2.1.6. Manajemen Laba

2.1.6.1. Pengertian Laba

Informasi tentang laba mempunyai peran yang sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak eksternal dan internal perusahaan sering menggunakan laba sebagai pengukuran prestasi, hasil usaha,

laba maupun posisi keuangan suatu perusahaan. Sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pemberian bonus kepada manajer, pengukur kinerja manajemen, dasar penentu besarnya pengenaan pajak, dan pembagian dividen.

Laba adalah selisih lebih pendapatan atau beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Laba dapat melihat sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.

Pengertian laba menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:309) adalah sebagai berikut:

“Laba akuntansi adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”.

Menurut Zaky Baridwan (2004:29) laba adalah:

“Kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik”.

Sedangkan menurut Henry Simamora (2006:45):

“Laba adalah perbandingan antara pendapatan dengan beban jikalau pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba didapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar daripada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapatkan rugi.

2.1.6.2. Jenis-jenis Laba

Adapun jenis-jenis laba menurut Soemarso S.R. (2004: 74) menyatakan laba terdiri dari:

1. Laba bersih
2. Laba bruto
3. Laba usaha
4. Laba ditahan

Adapun penjelasan jenis-jenis laba di atas, yaitu:

1. Laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha
2. Laba bruto adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.
3. Laba usaha adalah selisih antara laba bruto dan beban usaha atau laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.

4. Laba ditahan adalah jumlah akumulasi laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi distribusi laba yang dilakukan.

2.1.6.3. Tujuan Laba

Tujuan pelaporan laba menurut Sofyan Syafri Harahap (2011: 300) adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara.
2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan
4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang.
5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.
6. Menjadi prestasi atau kinerja perusahaan/ segmen perusahaan/ divisi.
7. Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat.

2.1.6.4. Pengertian Manajemen Laba

Ada alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba. Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko.

Secara umum ada beberapa definisi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu definisi manajemen laba yang diciptakan oleh Davidson, Stickney, dan Weil (1987), Schipper (1989), *National Association of Fraud Examiners* (1993), Fisher dan Rosenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan Wahlen (1999) dalam (Sri Sulistyanto, 2008).

Menurut Davidson, Stickney, dan Weil (1987) dalam Sri Sulistyanto (2008:48):

“Earnings management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan)”.

Menurut Schipper (1989) dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is a purpose intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain as opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process (Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)”.

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993) dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).”

Menurut Fisher dan Rosenzweig (1995) dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is a actions of manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang)”.

Menurut Lewitt (1998) dalam Sri Sulistyanto (2008:50):

“Management laba is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions (Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipu mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer).”

Healy dan Wahlen (1999) dalam Sri Sulistyanto (2008:50):

“Earnings management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contactual outcomes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu).”

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini

atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

2.1.6.5. Pola dan Teknik Manajemen Laba

Scott (2003: 383) dalam Herawaty (2008), menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a bath*
2. *Income minimization*
3. *Income maximization*
4. *Income smoothing*

Adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk manajemen laba di atas adalah sebagai berikut:

1. *Taking a bath* (tekanan dalam organisasi)

Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya, laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. *Income minimization* (meminimumkan laba)

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas

barang-barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization* (memaksimalkan laba)

Memaksimalkan laba bertujuan untuk memper-*trend* peroleh bonus yang lebih besar, selain itu memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income smoothing*

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan *trend* pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

Pola manajemen laba dalam Sri Sulistyanto (2008: 177), antara lain: menaikkan laba (*income increasing*), penurunan laba (*income decreasing*), dan perataan laba (*income smoothing*).

Pola menaikkan laba (*income increasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

Pola penurunan laba (*income decreasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode

berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

Pola perataan laba (*income smoothing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2. Mengubah metoda akuntansi
Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.
3. Menggeser perioda biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada perioda akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.1.6.6. Motivasi Manajemen Laba

Banyak alasan untuk melakukan laba, termasuk meningkatkan kompensasi, manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sri Sulistyanto (2008:63), secara umum ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk berperilaku

oportunis, yaitu motivasi bonus, kontrak, politik, pajak, perubahan CEO, IPO atau SEO, dan mengkomunikasikan informasi ke investor. Pengelompokan ini sejalan dengan tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*positive accounting theory*), yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba yaitu:

1. *Bonus plan hypothesis*
Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.
2. *Debt Covenant Hypothesis*
Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.
3. *Political Cost Hypothesis*
Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Herawaty (2008) mengemukakan beberapa motivasi yang mendorong manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus scheme*
Adanya asimetri informasi antara manajer dengan investor berkenaan dengan laba bersih yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan, dimana pihak manajer mempunyai informasi lebih sebelum dilaporkan

dalam laporan keuangan, dimana pihak manajer mempunyai informasi lebih sebelum dilaporkan dalam laporan keuangan, sedangkan pihak luar dan investor tidak bisa mengetahui informasi itu hingga mereka membaca laporan tersebut. Oleh karena itu, manajer perusahaan akan berusaha untuk mengatur tingkat laba bersih berdasarkan kontrak perjanjian mereka dengan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan tingkat bonus yang mereka terima.

2. *Debt covenant*

Debt covenant atau kontrak jangka panjang merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur atas tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan. tindakan-tindakan yang dapat menurunkan tingkat keamanan atau menaikkan resiko kreditur seperti pembagian dividen yang berlebihan, pemberi pinjaman yang berlebihan ataupun memberikan modal kerja kepada pemilik di atas perjanjian yang telah ditetapkan. Manajemen laba dalam konteks *debt covenant* sering dilakukan perusahaan yang berada dalam ancaman kebangkrutan agar tetap bertahan.

3. *Political Motivations*

Adanya aspek politis tidak dapat dipisahkan dari operasional suatu perusahaan khususnya perusahaan dalam skala besar dan industri strategis yang aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Perusahaan seperti ini cenderung untuk menurunkan labanya, misalnya dengan praktik dan prosedur akuntansi.

4. *Taxation Motivations*

Masalah perpajakan merupakan salah satu alasan mengapa pihak manajemen perusahaan berusaha mengurangi tingkat laba bersih yang dilaporkan agar nilai pajak yang harus ditanggung dapat diperkecil.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Adanya pergantian CEO biasanya diikuti dengan fenomena manajemen laba, dimana seorang CEO yang mendekati masa akhir jabatannya biasanya berusaha memaksimalkan laba yang dilaporkan agar tingkat bonus yang mereka terima bisa lebih tinggi. Demikian pula apabila CEO yang kurang berhasil dalam meningkatkan kinerja perusahaannya kadang berusaha melakukan manipulasi biaya yang akan datang, dimana biaya yang akan datang diakui saat ini dengan harapan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi dimasa mendatang.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang melakukan penawaran saham untuk pertama kalinya biasanya dihadapkan pada tiga masalah penentuan harga saham yang ditawarkan, karena perusahaan tersebut belum mempunyai harga pasar. Dengan demikian perusahaan cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga saham sesuai dengan keinginannya, dengan cara memanipulasi tingkat laba bersih. Laba bersih dalam laporan keuangan dalam prospectus merupakan sumber informasi yang dapat

menarik investor karena laba bersih sering dianggap investor sebagai suatu sinyal mengenai nilai perusahaan.

7. Mengkomunikasikan Informasi pada Investor

Efisiensi pasar relatif terhadap kesediaan informasi secara *public*. jika manajemen laba dapat mengungkapkan *inside information*, maka hal tersebut dapat meningkatkan informasi pelaporan keuangan. Jika laporan laba diatur agar mewakili manajemen dalam mengestimasi kekuatan laba secara terus menerus, dan pasar mewujudkannya, harga saham secara cepat akan mencerminkan *inside information* tersebut.

2.1.6.7. Ciri-Ciri Perusahaan yang Melakukan Manajemen Laba

Sri Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan seiring dengan perkembangan ilmu dan penelitian akuntansi ini, yaitu model yang berbasis *aggregate accrual*, *specific accruals*, dan *distribution of earning after management*. Namun, sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accrual* diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba.

Alasannya, model ini sejalan dengan basis akuntansi akrual yang selama ini banyak dipergunakan (*accruals basis of accounting*), yang membuat munculnya komponen akrual yang sangat mudah untuk dipermainkan besar kecilnya. Selain itu, model *aggregate accrual* menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan itu. Hal ini sejalan dengan basis akuntansi yang digunakan, sebab akun akrual memang ada dalam setiap komponen laporan keuangan tanpa terkecuali. Model berbasis *aggregate accrual* ini dikembangkan oleh beberapa peneliti, yaitu Healy, DeAngelo, Jones, Dechow, Sloan, dan Sweeney, serta Kang dan Suvaramkrishnan.

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen

yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya memperlakukan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan arus kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.

Oleh sebab itu, upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini digunakan dan diakui secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan. Untuk mengakui biaya yang sudah menjadi kewajiban maka perusahaan tidak perlu memperhatikan waktu dan pengeluaran kas. Artinya biaya dapat diakui pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan biaya yang merupakan komponen alokasi harga pokok aktiva yang dimilikinya pada saat barang terjual.

Sebaliknya metode pencatatan ini membuat perusahaan dapat menunda pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode berikutnya, meskipun kas telah diterima. Artinya, perusahaan dapat mengakui pendapatan pada periode yang akan datang. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai *account* akrual dalam laporan keuangan, misalnya piutang datang, pendapatan diterima dimuka, hutang biaya, biaya depresiasi, dan biaya dikeluarkan dimuka, biaya cadangan, dan lain-lain.

Model pencatatan akrual ini berbeda dengan model akuntansi berbasis kas (*cash basis of accounting*) yang hanya mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan biaya pada saat kas dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas ini menghitung dan menentukan laba periode berjalan tergantung pada penerimaan dan pengeluaran kas tunai sehingga prinsip penandingan (*matching cost to revenue*) diabaikan. Akibatnya, laporan keuangan yang dibuat dengan basis kas tidak dapat mencerminkan kinerja sesungguhnya suatu perusahaan selama periode tertentu.

Adapun indikasi perusahaan yang melakukan *earning management* menurut Sri Sulistyanto (2008) adalah sebagai berikut:

1. Laba bersih lebih kecil dibandingkan arus kas operasi

Upaya semacam ini disebut *income decreasing management*. Ada dua kemungkinan yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi.

- a. Besar kecilnya arus kas operasi dipengaruhi oleh besar kecilnya transaksi penerimaan tunai. Artinya, semakin besar transaksi penerimaan tunainya semakin besar pula arus kas operasi atau semakin kecil transaksi penerimaan tunainya semakin kecil pula arus kas operasinya. Maka apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu transaksi penerimaan tunai lebih kecil daripada arus kas operasi, kemungkinan besar perusahaan berusaha menyembunyikan pendapatan sesungguhnya.

Upaya di atas bisa dilakukan dengan mengakui penerimaan tunai sebagai pendapatan diterima dimuka sehingga transaksi ini harus dicatat dalam neraca sebagai komponen hutang dan bukan dalam laporan laba rugi sebagai komponen pendapatan. Selain mengakibatkan pendapatan periode berjalan akan lebih kecil dibandingkan pendapatan sesungguhnya maka pengakuan semacam ini membuat pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil dibandingkan arus kas operasi periode berjalan. Laba bersih periode berjalan pun akan menjadi lebih rendah dibandingkan

dengan laba bersih sesungguhnya maupun arus kas operasi sesungguhnya

- b. Besar kecilnya laba bersih dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya periode berjalan. Artinya, semakin besar biaya akan membuat semakin kecil laba periode berjalan atau semakin kecil biaya akan membuat semakin besar laba periode berjalan. Oleh sebab itu, tanpa harus menyembunyikan pendapatan sesungguhnya perusahaan dapat mempunyai laba bersih, bisa lebih rendah daripada arus kas operasi apabila biaya yang dikeluarkan besar. Selain itu, dengan mempermainkan biaya akrual menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya, laba bersih perusahaan pun juga bisa menjadi lebih kecil daripada arus kas operasi.

Upaya lain yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan mempermainkan pendapatan tunai periode berjalan agar menjadi lebih kecil daripada pendapatan sesungguhnya. Upaya ini akan mengakibatkan laba bersih menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya meskipun perusahaan tidak mempermainkan biaya. Upaya lain adalah dengan mengatur besar kecilnya pendapatan dan biaya sekaligus. Pendapatan tunai diatur supaya lebih kecil dibandingkan pendapatan sesungguhnya, sedangkan biaya diatur menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Hal ini secara langsung juga akan mengakibatkan laba bersih periode berjalan menjadi lebih kecil dibandingkan arus kas operasinya.

2. Laba bersih lebih besar dibandingkan arus kas operasi

Upaya semacam ini disebut dengan *income decreasing management*. Ada dua kemungkinan yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi:

- a. Hal ini menunjukkan bahwa selama satu periode tertentu perusahaan lebih banyak melakukan banyak transaksi penerimaan nontunai (kredit) daripada transaksi penerimaan tunai. Hingga pendapatan yang diakui selama periode itu akan lebih besar dibandingkan kas yang diterima. Akibatnya, laba bersih pada periode bersangkutan akan lebih besar dibandingkan arus kas operasinya.

Kemungkinan lain adalah perusahaan mengakui pendapatan selama satu periode tertentu lebih besar dibandingkan pendapatan sesungguhnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mempermainkan pendapatan-pendapatan akrual yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik. Upaya semacam ini akan membuat pendapatan perusahaan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan pendapatan sesungguhnya pada periode tertentu. Hingga laba bersih periode bersangkutan akan lebih besar dibandingkan arus kas operasinya.

- b. Besar kecilnya laba bersih juga dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya periode berjalan. Artinya, semakin besar biaya akan membuat semakin kecil laba periode berjalan atau semakin kecil biaya akan membuat semakin besar laba periode berjalan. Oleh

sebab itu, tanpa harus mempermainkan pendapatan sesungguhnya perusahaan dapat mempunyai laba bersih bisa lebih besar daripada arus kas operasi apabila biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Selain itu, perusahaan pun bisa mempermainkan biaya akrual menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya sehingga laba bersih perusahaan pun bisa menjadi lebih besar daripada arus kas operasi.

Upaya lain yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan mempermainkan pendapatan tunai periode berjalan agar menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Upaya ini akan mengakibatkan laba bersih menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya meskipun perusahaan tidak mempermainkan biaya. Upaya lain lagi adalah dengan mengatur besar kecilnya pendapatan dan biaya sekaligus. Pendapatan tunai diatur supaya lebih besar dibandingkan pendapatan sesungguhnya. Sedangkan biaya diatur menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Hal ini secara langsung akan mengakibatkan laba bersih periode berjalan menjadi lebih besar dibandingkan arus kas operasinya.

2.1.6.8. Pendekatan untuk Mendeteksi Manajemen Laba

Sri Sulistyanto (2008) menjelaskan bahwa secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan oleh para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu model yang berbasis *aggregate accrual*, *specific accruals*, dan *distribution of earnings after management*. Salah satunya yaitu model yang berbasis *aggregate accrual*, model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Dechow, Sloan, dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones model*). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan (*expected accruals*) dan akrual yang tidak diharapkan (*unexpected accruals*).

Model Healy merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Padahal total akrual merupakan penjumlahan *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan (*discretion*) manajerial, sementara *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajer perusahaan. Atas dasar pemikiran ini bisa disimpulkan ada kelemahan mendasar dalam model Healy, sebab memasukkan komponen *nondiscretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba seolah menganggap manajer dapat mengatur dan merekayasa semua komponen akrual tanpa terkecuali. Hal ini tentu kontradiktif dengan filosofi dasar akuntansi yang mengatakan bahwa manajer tetap mempunyai keterbatasan dalam mengatur besar kecilnya komponen akrual.

Model DeAngelo dikembangkan dengan menggunakan perubahan dalam total akrual (*change in total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Model Jones menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant, and equipment* sebagai proksi manajemen laba.

Model Jones dimodifikasi (*modified Jones model*) menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant, and equipment*, di mana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan. Sementara Kang dan Suvaramakrishnan menggunakan sisa regresi dari aktiva lancar nonkas yang dikurangi dengan kewajiban yang dibagi

dengan aktiva itu pada periode sebelumnya, yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan, biaya, dan *plant and equipment* sebagai proksi manajemen laba.

Model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, diantaranya:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba akuntansi (*earning after tax*) yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ from\ Operations$$

Untuk menghitung *nondiscretionary accruals* model Healy membagi rata-rata akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *nondiscretionary accruals* dan dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\sum TA}{T}$$

Notasi:

NDA = *Nondiscretionary accruals*

TAC = total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1

T = 1,2,...T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Ada kelemahan mendasar dalam model Healy yang diindikasikan oleh Dechow et al. (1995) bahwa total akrual yang digunakan oleh model ini sebagai proksi manajemen laba juga mengandung *nondiscretionary accruals*. Padahal *nondiscretionary accruals* merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola dan diatur oleh manajer seperti halnya komponen *discretionary accruals*. Atau dengan kata lain, model Healy mengarah kepada uji yang salah spesifikasi. Kelemahan seperti ini dalam ilmu ekonometrika disebut salah pengukuran. Namun, Healy beralasan bahwa *nondiscretionary accruals* tidak dapat diobservasi dari laporan keuangan, sehingga terpaksa menggunakan total akrual sebagai proksi manajemen laba.

2. Model DeAngelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga

menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi (*earnings after tax*) yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut:

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ from\ Operations$$

Model DeAngelo mengukur atau memproksikan manajemen laba dengan *nondiscretionary accruals*, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya. Atau dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = TAC_t$$

Notasi:

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t.

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

Secara umum, seperti halnya model Healy, Model DeAngelo juga menggunakan total akrual periode estimasi sebagai proksi *expected nondiscretionary accruals*. Seandainya *nondiscretionary accruals* selalu konstan setiap saat dan *discretionary accruals* merupakan rata-rata sama dengan nol selama periode estimasi, maka kedua model ini akan mengukur *discretionary accruals* tanpa kesalahan. Namun, apabila *nondiscretionary accruals* berubah dari periode ke periode, maka kedua model ini akan mengukur *discretionary accruals* dengan kesalahan.

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan. hal ini sesuai dengan penelitian Kaplan (1985) yang merupakan dasar mengembangkan model yang menyatakan bahwa akrual ekuivalen dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan manajerial atau hasil yang diperoleh dari proses perubahan kondisi ekonomi perusahaan. atas dasar alasan itulah model Jones mengusahakan untuk mengendalikan pengaruh perubahan kondisi perekonomian perusahaan terhadap *nondiscretionary accruals*. Selain itu, model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan.

- a. Akrual periode berjalan (*current accruals*), yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan penjualan, sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya.

- b. *Gross property, plant, and equipment* merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akrual, khususnya untuk biaya depresiasi *nondiscretionary*.

Atas dasar dua asumsi di atas, untuk menghitung total akrual, model ini menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan *gross property, plant, and equipment*. Sementara untuk menghitung *nondiscretionary accruals* di tahun peristiwa model ini merumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{A_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

Notasi:

ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1.

PPE_t = *Gross property, plant, and equipment* periode t.

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = *Firm-specific parameters*.

Estimasi $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{t-1}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right] + \alpha_3 \left[\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} + v_t \right] + \Sigma$$

Notasi:

TAC_t = Total akrual

Secara implisit model Jones mengasumsikan bahwa pendapatan merupakan *nondiscretionary*. Apabila *earning* dikelola dengan menggunakan pendapatan *discretionary*, maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk diproksi *discretionary accruals*.

4. Model Jones Dimodifikasi

Model Jones dimodifikasi (*modified Jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling *robust*.

Sama halnya dengan model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* yang lain model ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Kelebihannya, model ini memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual, yaitu *discretionary current accruals*, *discretionary long-term accruals*, *nondiscretionary current accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*. *Discretionary current accruals* dan *discretionary long-*

term accruals merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar (*current assets*), sedangkan *nondiscretionary current accruals* dan *nondiscretionary long-term accruals* merupakan akrual yang berasal dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*).

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ from\ Operations$$

Akrual periode berjalan (*current accruals*) didefinisikan sebagai perubahan aktiva lancar non-kas (*noncash current assets*) dikurangi perubahan kewajiban lancar (*operating current liabilities*). Perubahan aktiva lancar non-kas akan dihitung sebagai perubahan aktiva lancar dikurangi dengan kas, sedangkan perubahan kewajiban lancar akan dihitung sebagai perubahan total hutang dikurang dengan hutang jangka panjang jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ accruals = D(current\ assets - cash) - D(current\ liabilities - current\ maturity\ of\ long - term\ debt)$$

Nondiscretionary current accruals merupakan *accruals* yang diekspetasi menggunakan *modified Jones* model. *Expected current accruals* sebuah perusahaan di tahun tertentu diestimasi dengan menggunakan *cross-sectional ordinary least square* (OLS) *regression* terhadap *current accruals* (*CurAcc*) dan perubahan penjualan.

$$\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Semua nilai di atas diregresikan dengan menggunakan $\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen, sedangkan $\left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right]$ dan $\left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$ sebagai variabel independen. Regresi terhadap tiga komponen ini menghasilkan nilai α_1 dan α_2 yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals* dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$NDCA_{i,t} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Notasi:

- NDAC_{i,t} = *Nondiscretionary accruals* perusahaan i periode t
 α_1 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t
 α_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t
 TA_{i, t-1} = *Total assets* untuk perusahaan i periode t-1

$\Delta Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t
 $\Delta TR_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t

Discretionary current accruals untuk sebuah perusahaan pada tahun tertentu dihitung sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}$$

Notasi:

$CDA_{i,t}$ = *Discretionary current accruals* perusahaan i periode t

$CurAcc_{i,t}$ = *Current accruals* perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode t-1.

$NDCA_{i,t}$ = *Nondiscretionary current accruals* perusahaan i periode t

Untuk menghitung *discretionary* dan *nondiscretionary long-term accruals*, harus menghitung *discretionary* dan *nondiscretionary total accruals*. *Discretionary total accruals* sebuah perusahaan di tahun tertentu dihitung meregresi total akrual sebagai dependen variabel dan *gross property, plant, and equipment* (PPE) sebagai *additional explanatory variable*.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Semua nilai di atas diregresikan dengan menggunakan $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen, sedangkan $\left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right]$, $\left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$, dan $\left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$ sebagai variabel independen. Regresi terhadap keempat komponen ini menghasilkan nilai b_1 , b_2 , dan b_3 yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals* (NDTA) dihitung sebagai berikut:

$$NDTA_{i,t} = \hat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Notasi:

\hat{b}_0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

\hat{b}_1, \hat{b}_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = *Gross property, plant, and equipment* perusahaan i periode t

$\Delta TA_{i,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t.

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajemen laba ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai *The Modified Jones Model* yang merupakan modifikasi dari *The Jones Model*. Sri Sulistyanto (2008:226) menyatakan bahwa:

“*The Modified Jones Model* ini merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksian manajemen laba lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow et al (1995).”

Model Jones yang dimodifikasi mengestimasi level ekspektasi akrual sebagai suatu fungsi dari perbedaan antara perubahan pendapatan dan perubahan piutang, dan tingkat dari tanah, bangunan, dan perlengkapan (*plant, property, and equipment*).

Menurut Sri Sulistyanto (2008:227), langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *discretionary accruals* (DTA), yaitu:

1. Menghitung nilai *Total Accruals* (TAC),
2. Selanjutnya dihitung nilai *total accruals* (TAC) yang diestimasi dengan melakukan regresi terhadap rumus dibawah ini untuk mendapatkan nilai koefisien variabel independen ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$)
3. Nilai koefisien variabel independen ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) yang diperoleh, dimasukkan ke dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDTA)
4. Menghitung nilai *Discretionary Accruals* (DTA).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *discretionary accruals* (DTA) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai *Total Accruals* (TAC), dengan rumus:

$$TAC_{it} = Net\ Income\ (NI_{it}) - Cash\ Flow\ from\ Operation\ (CFO_{it})$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi pada periode t

- Selanjutnya dihitung nilai *total accruals* (TAC) yang diestimasi dengan melakukan regresi terhadap rumus di bawah ini untuk mendapatkan nilai koefisien variabel independen ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$)

$$TAC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \alpha_2(\Delta Sales_{it} - TA_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/TA_{it-1}) + \epsilon$$

Keterangan:

TA_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

$\Delta Sales_{it}$ = Perubahan penjualan perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} = Nilai aktiva tetap (*gross*) perusahaan 1 pada periode t

- Nilai koefisien variabel independen ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) yang diperoleh, dimasukkan ke dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDTA)

$$NDTA_{it} = \alpha_1(i/TA_{it-1}) + \alpha_2((\Delta sales_{it} - \Delta TR_{it})/TA_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Keterangan:

ΔTR_{it} = Perubahan piutang dagang perusahaan i pada periode ke t

- Menghitung nilai *Discretionary Accruals* (DTA), dengan rumus:

$$DTA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDTA_{it}$$

Nilai *discretionary accruals* (DTA) positif, berarti perusahaan melakukan manajemen dengan cara menaikkan laba, bila nilai *discretionary accruals* (DTA) negatif, berarti perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara

menurunkan laba, dan bila *discretionary accruals* (DTA) nol, berarti tidak terdapat indikasi manajemen laba dalam perusahaan.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008:313), ukuran perusahaan adalah: “besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva.”

Menurut Scott dalam Torang (2012: 93) menyebutkan ukuran perusahaan sebagai: “ukuran organisasi yang merupakan suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.”

Menurut Kusumawardhani (2012) mengenai ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga dimungkinkan melakukan manajemen laba. ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar saham.”

Siregar dan Utama (2005) mengenai ukuran perusahaan menyatakan bahwa: “Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak”.

Menurut Johnson dan Ramanan (1988) dalam Sanjaya (2010) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah logaritma dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log-Asset}$$

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No.11/PM/1997, yang menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (*total assets*) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aset. Ukuran aset tersebut diukur sebagai logaritma dari total aset. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya (Manalu, 2010).

2.1.8. Leverage

Menurut Pambudi dan Sumantri (2014), "*leverage* adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva perusahaan".

Menurut Sanjaya (2010), *Leverage* merupakan: "nilai yang diperoleh dari total utang dibagi dengan total aset."

Menurut Sartono (2008:120), "*financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya".

Menurut Raharja (2014), *leverage* adalah:

"...hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. *Leverage* dibagi menjadi dua yaitu *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *leverage* keuangan (*financial leverage*). *Leverage* operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan *leverage* keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan *equity* yang dimilikinya".

Sedangkan menurut Sutrisno (2012:222), rasio *leverage* adalah “menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang”.

Sweeney (1994) dan DeFond dan Jiambalvo (1994) dalam Sanjaya (2010) menegaskan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang besar cenderung melakukan manajemen laba. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* yang kecil cenderung tidak melakukan manajemen laba.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah pengukuran yang menunjukkan proporsi atas kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dengan hutang.

Dalam Sartono (2008:121), pengukuran rasio *leverage* secara umum ada 5, yaitu:

1. *Debt to Assets ratio (debt ratio)* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aktiva}$$

2. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri.

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Modal\ Sendiri}$$

3. *Time Interest Earned Ratio* merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage* mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran, pinjaman, dan sewa.

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{PEmbayaran Sewa}}{\text{Beban bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5. *Debt Service Coverage* mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman.

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran pokok pinjaman}}{(1 - \text{Tarif Pajak})}}$$

Menurut Kasmir (2009:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Penulis menggunakan indikator *debt ratio* dalam penelitian ini. Menurut Kasmir (2008: 156) *debt ratio* merupakan: “ratio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.”

Menurut Syamsudin (2007: 54), *debt ratio* merupakan: “pengukuran jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur.”

Menurut Kasmir (2008: 156) dari hasil pengukuran:

“apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai oleh utang.”

2.1.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Sylvia Veronica N.P. Siregar dan Siddharta Utama (2005)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earnings Management</i>)	- Kepemilikan Keluarga (X ₁) - Kepemilikan Institusional (X ₂) - Ukuran Perusahaan (X ₃) - Praktek <i>Corporate Governance</i> (X ₄) - Manajemen	- Variabel ukuran perusahaan secara konsisten mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. - Rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi secara signifikan lebih

			Laba (Y)	tinggi daripada rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan lain.
2.	I Putu Sugiarta Sanjaya (2010)	Efek <i>Entrenchment dan Alignment</i> pada Manajemen Laba	<ul style="list-style-type: none"> - Hak Kontrol (X_1) - Hak Aliran Kas (X_2) - Manajemen Laba (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh hak kontrol yang positif dan signifikan terhadap manajemen laba - Pengaruh hak aliran kas yang negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Diana Verawati (2012)	Pengaruh Diversifikasi Operasi, Diversifikasi Geografis, <i>Leverage</i> , dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba	<ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi Operasi - Diversifikasi Geografis - <i>Leverage</i> - Kepemilikan Terkonsentrasi - Kepemilikan Asing - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial - Manajemen Laba 	<ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. - Diversifikasi geografis berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap manajemen laba. - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba. - Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. - Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. - Kepemilikan institusional berpengaruh negatif

				terhadap manajemen laba. - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
4.	Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013)	Analisis Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan	- Dewan Komisaris Independen (X_1) - Komite Audit (X_2) - Kualitas Auditor (X_3) - Kepemilikan Manajerial (X_4) - Kepemilikan Institusional (X_5)	- Faktor-faktor <i>corporate governance</i> (komisaris independen dan kualitas auditor) terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan hanya komite audit saja yang belum terbukti. - Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan institusional) tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba.
5.	Dewi Fatmawati dan Arifin Sabeni (2013)	Pengaruh Diversifikasi Geografis, Konsentrasi Kepemilikan Perusahaan, dan Masa Perikatan Audit terhadap Manajemen Laba	- Diversifikasi Geografis (X_1) - Diversifikasi industri (X_2) - Konsentrasi Kepemilikan Perusahaan (X_3) - Masa Perikatan	- Diversifikasi geografis dan masa perikatan audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba - Diversifikasi industri dan konsentrasi kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

			Audit (X ₄) - Manajemen Laba (Y)	
6.	I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba	- Kepemilikan Manajerial (X ₁) - Kepemilikan Institusional (X ₂) - Manajemen Laba (Y)	- Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba.
7.	Starga Lamora P., Vince dan Kamaliah (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Manajemen Laba (<i>Earning Management</i>) Pada Perusahaan Berkepemilikan Ultimat Yang Terdaftar di BEI	- Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Keluarga - Manajemen Laba	- Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. - Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh *Entrenchment* (Hak Kontrol) terhadap Manajemen Laba

Dalam kepemilikan terkonsentrasi, konflik keagenan yang terjadi adalah antara pemegang saham pengendali dan nonpengendali. Kenaikan hak kontrol menyebabkan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi untuk meningkatkan manfaat privat. Dengan kontrol yang kuat, pemegang saham pengendali dapat mengeruk kekayaan perusahaan sehingga nilai perusahaan menurun. Menurut Shleifer dan Vishny (1997: 759) dalam Sanjaya (2010), “*as ownership gets beyond a certain point, the large owners gain nearly full control and prefer to use firms to generate private benefits of control that are not shared by minority shareholders*”. Pendapat Shleifer dan Vishny (1997) sejalan dengan argumen *negative entrenchment effect* yaitu pemegang saham pengendali termotivasi untuk menggunakan hak kontrolnya untuk mendapatkan manfaat privat.

Sanjaya (2010) menyatakan hak kontrol berimplikasi ekspropriasi pemegang saham nonpengendali. Pemegang saham pengendali tertarik untuk mendapatkan manfaat privat yang tidak diberikan kepada pemegang saham nonpengendali. Siregar (2008) juga membukukan kenaikan hak kontrol pemegang saham pengendali menyebabkan jumlah dividen tunai turun. La Porta *et al.* (1999) juga menegaskan bahwa pemegang saham pengendali secara efektif mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali mungkin mencoba untuk mengeksploitasi posisinya dan mencari keuntungan pribadi. Hal seperti ini

terjadi karena ia menanggung biaya yang lebih rendah dibanding manfaat yang diperoleh.

Sanjaya (2010) mengemukakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini berlandaskan pada *negative entrenchment effect*. Efek ini menegaskan bahwa hak kontrol memfasilitasi pemegang saham pengendali untuk mengekspropriasi pemegang saham nonpengendali. Untuk menyembunyikan ekspropriasi, pemegang saham pengendali melakukan manajemen laba. Hal ini kemungkinan terjadi karena kenaikan hak kontrol memfasilitasi pemegang saham pengendali secara kuat untuk mengendalikan proses penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba lebih banyak dipilih oleh pemegang saham pengendali karena *stakeholder* tidak mudah mendeteksi tindakan ini.

Penelitian ini menduga hak kontrol memotivasi pemegang saham pengendali untuk mengatur laba. Argumen ini juga berlandaskan pada temuan Leuz *et al.* (2003) dalam Sanjaya (2010) bahwa manfaat privat menaikkan manajemen laba.

2.2.2. Pengaruh *Alignment* (Hak Aliran Kas) terhadap Manajemen Laba

Menurut Siregar (2008) Kenaikan hak aliran kas di tangan seorang pemegang saham pengendali menyebabkan insentif keuangan naik. Kenaikan hak aliran kas kan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya dengan perusahaan atau pemegang saham nonpengendali. Hak aliran kas merupakan sumber insentif keuangan yang mampu membatasi tindakan

ekspropriasi. Sanjaya (2010) menyebutkan bahwa kondisi ini menyebabkan hubungan positif antara nilai perusahaan dan hak aliran kas.

Penelitian ini menduga kenaikan hak aliran kas memotivasi pemegang saham pengendali untuk mengurangi manajemen laba. Karena pemegang saham pengendali tidak tertarik untuk mengekspropriasi pemegang saham nonpengendali. Jika ia melakukan ini, pemegang saham pengendali menanggung kerugian yang besar. Dalam hal demikian, pemegang saham pengendali juga tidak tertarik untuk mengatur laba. Pengaturan ini akan menurunkan kualitas informasi laporan keuangan yang juga berdampak kepada kesejahteraannya.

2.2.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Boediono (2005) menyatakan dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi manajemen laba.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengemukakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik

keagenan. Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajemen dan pemegang saham sehingga bertindak sesuai keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajemen termotivasi meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Siallagan dan Machfoedz (2006) juga mengemukakan hal yang sama bahwa kepemilikan manajer juga akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Dengan demikian pula, dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba, karena semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya.

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk manajemen laba. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Siallagan dan Machfoedz (2006) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi kualitas laba. Studi ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka *discretionary accrual*-nya akan semakin rendah, dan berarti praktek manajemen laba semakin berkurang.

2.2.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Menurut Boediono (2005), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Pemegang saham institusional memiliki dorongan untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen untuk melindungi investasi mereka yang signifikan. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki oleh investor institusional ini dapat mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Boediono (2005) mengemukakan, melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan manajemen.

Menurut Siregar dan Utama (2006) investor institusional juga sering disebut sebagai investor yang *shopisticated*. Sebagai investor yang *shopisticated*, investor institusional dapat melakukan fungsi *monitoring* secara lebih efektif dan

tidak akan mudah dipengaruhi dan diperdaya oleh tindakan manipulasi oleh manajer seperti manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2003) justru tidak menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan oleh investor institusional dengan manajemen laba. Hal ini tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Macfoedz (2003) yang hasilnya menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan kualitas laba yang diukur dengan *earning response coefficient*. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional berhasil menjadi mekanisme yang mengontrol dan meminimalkan perilaku manipulasi laba oleh manajer sehingga kualitas laba yang dilaporkan dapat meningkat.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 = Terdapat pengaruh *entrenchment*/ hak kontrol pemegang saham pengendali terhadap manajemen laba.

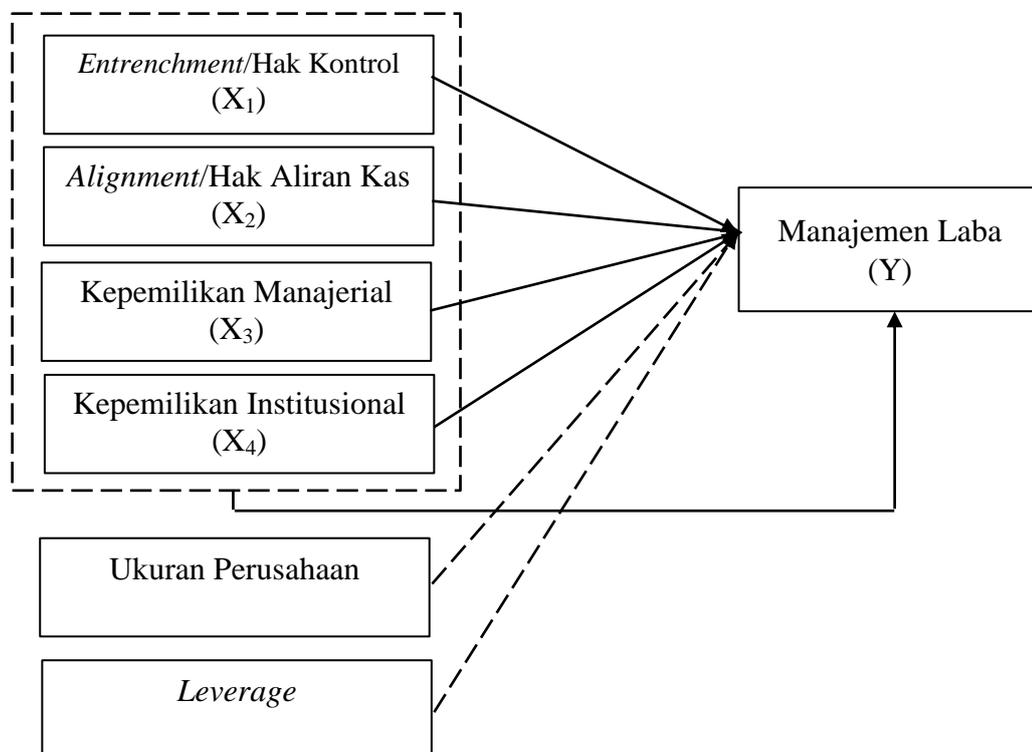
Hipotesis 2 = Terdapat pengaruh *alignment*/ hak aliran kas pemegang saham pengendali terhadap manajemen laba.

Hipotesis 3 = Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

Hipotesis 4 = Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

Hipotesis 5 = Terdapat pengaruh *entrenchment/* hak kontrol pemegang saham pengendali, *alignment/* hak aliran kas pemegang saham pengendali, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional secara simultan terhadap manajemen laba.

Apabila tergambarakan model penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran